

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Shomad. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- _____ dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Anonim. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- Jaenal Arifin. 2008. *Peradilan dalam Bingkai Reformasi Hukum Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Jaih Mubarak. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nani Soewondo. 1955. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Timun Mas. Jakarta.
- Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan. Jakarta.
- _____. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Pranada Media. Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim. 1987. *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*. Rajawali. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni. Banjarmasin.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.
- W.J.S. Poerwodarminto. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Jurnal

- Arief Sumeru. 2016. *Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemeritahan Desa*. JKMP, Universitas Airlangga. Vol. 4 No. 10.
- Dody Eko Widjayanto. 2014. *Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa*. Jurnal Independent. Vol. 2 No. 1.
- Santoso. 2016. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Yudisia. Vol. 7 No. 2.
- Sri Lestari Rahayu. 2016. *Penguatan Fungsi Kepala Desa sebagai Mediator Perseisihan Masyarakat di Desa*. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 2.
- Via Kurniati. 2016. *Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Status Pekerjaan dan Tingkat Pendapatan dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 2.

Peraturan perUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasihatan-Pembinaan-dan-Pelestraian-Perkawinan> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pada pukul 15.00 WITA.

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1402451369> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 pada pukul 15.30 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama/> diakses pada tanggal 5 Januari 2020 pada pukul 19.00 WITA.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lamasi,_Luwu diakses pada 10 Mei 2020 pada pukul 15.00 WITA.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada 5 Agustus 2020 pada pukul 14.45 WITA.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami masing-masing sebagai berikut :

1. Nama :
NIK :
Tempat/ Tgl Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Pihak Pertama

2. Nama :
NIK :
Tempat/ Tgl Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Pihak Kedua

Bahwa kami (Kedua Belah Pihak) adalah Pasangan Suami Istri yang Sah selama beberapa tahun yang lalu, namun pada saat sekarang ini kami mengalami beberapa permasalahan dalam hidup berumah tangga yang akhirnya mengalami ketidakcocokan dalam rumah tangga.

Dengan adanya keadaan Rumah Tangga yang Demikian ini maka kami memutuskan untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :

1. Saya selaku pihak pertama (suami) dan saya selaku Pihak Kedua (Istri) tidak akan Keberatan apabila di kemudian hari baik Pihak maupun akan melakukan atau melaksanakan Nikah kembali dengan Perempuan atau Laki-Laki lain.
2. Pernyataan kami ini apabila dikemudian hari ada salah satu dari kami yang mengingkari akan menanggung segala resiko.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga dan sebagain pegangan kami berdua.

Wiwitan Timur, 27 Februari 2020

Kami Yang Membuat Pernyataan

Pihak II

Pihak I

Disaksikan oleh :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)



PENGADILAN AGAMA BELOPA

Jalan Tomakaka, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara
(Kompleks Dinas Perhubungan Kab. Luwu)
Kabupaten Luwu-Sulawesi Selatan-91984
1Homepage : www.belopa.pta-makassarkota.go.id
Email : belopa@pta-makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN

W.20 - A25 Pw / HM.00 / 3 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NASRIAH, S.H.
NIP : 19750706 199703 2 001
Pangkat/golongan : Penata Tk 1, III/d
Jabatan : Panitera
Instansi : Pengadilan Agama Belopa

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MUHAMMAD ADHIM RIANGDI
Nomor Pokok : B11116028
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Makassar

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 16 Maret 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang dilakukan secara lisan dihadapan Kepala Desa*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. diucapkan terima kasih.

Belopa, 16 Maret 2020

Ranitera

Nasriah, S.H
NIP. 19750706 199703 2 001

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- Ketua Pengadilan Agama Belopa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI
DESA WIWITAN TIMUR

Alamat : Jl. Gerunbul II, Desa Wiwitan Timur Kode Pos Pos. 91952

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUHARJO**
Jabatan : Kepala Desa Wiwitan Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD ADHIM RIANGDI**
Nmor Pokok : B11116028
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum KePerdataan
A l a m a t : Jl. Sultan Alauddin

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Desa Wiwitan Timur, Kec. Lamasi, Kab. Luwu guna penyusunan skripsi yang berjudul : “ TUJUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DI HADAPAN KEPALA DESA “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wiwitan Timur, 17 Maret 2020
Kepala Desa Wiwitan Timur,

SUHARJO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMASI
Alamat: Kelurahan Lamasi, Poros Lamasi - Pongsamelung

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BASRI, S.Ag, M.Si**
Jabatan : Kepala KUA Kec. Lamasi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD ADHIM RIANGDI**
Nomor pokok : B11116028
Jenis Kelamin : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Perdataan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Kantor Urusan Agama Kec. Lamasi, Kab. Luwu guna untuk penyusunan skripsi yang berjudul **“TUJUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DIHADAPAN KEPALA DESA “**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Lamasi, 17 Maret 2020





PENGADILAN NEGERI BELOPA
Jl. Sungai Paremang No. 21 Kel. Pammanu Kec. Belopa Utara
Kab. Luwu 91994
Telp. (0471) 3207765 Faksimili (0471) 3207765
Website : <http://pn-belopa.go.id> Email : pnbelopa@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Belopa Menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD ADHIM RIANGDI
Nomor Pokok : B11116028
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) di Pengadilan Negeri Belopa guna penyusunan Skripsi yang berjudul: **"TUJUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA LISAN DIHADAPAN KEPALA DESA"**.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 16 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Belopa



I Made Yuliana, S.H., M.H.
NIP. 197112312000031009